

RESPON DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI ARMS RACE DI KAWASAN ASIA TENGGARA (2014-2023)

Yogie Alied Karyadie¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

Southeast Asia is one of the regions facing complex challenges in terms of defense and security, where the security dilemma in this area is quite palpable despite the presence of ASEAN as a regional association. Ultimately, an arms race has become an inevitable situation in Southeast Asia, prompting Indonesia, as one of the influential countries in the region, to address this issue. This study aims to assess the readiness of Indonesia's military posture in responding to the security dynamics in Southeast Asia, where Indonesia is deemed necessary to balance the military posture development of other countries in the region. This research employs a qualitative-descriptive method to explain various arguments and data, while also utilizing a literature study technique to gather the necessary information. The conclusion of this research shows that Indonesia has begun to strengthen its defense and security through several efforts. First, by establishing arms contract cooperation with Russia. Second, by developing domestic military industries such as PT Pindad, PT PAL, and PT Dirgantara Indonesia. Third, by increasing the Gross Domestic Product (GDP), which correlates with the rise in Indonesia's defense budget.

Keywords: Security Dilemma, Military Posture, Security Dynamics, Arms Race

ABSTRAK

Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang memiliki permasalahan cukup kompleks dalam aspek pertahanan dan keamanan, yang mana kondisi dilema keamanan di kawasan ini cukup terasa walaupun terdapat ASEAN sebagai asosiasi regional di sana. Pada akhirnya perlombaan senjata menjadi salah satu kondisi yang tidak dapat dihindarkan di kawasan Asia Tenggara, yang mana Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di Asia Tenggara dirasa perlu untuk menanggapi hal tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana postur militer Indonesia memiliki kesiapan untuk menghadapi dinamika keamanan di Asia Tenggara, yang mana dalam keadaan ini Indonesia dirasa perlu untuk mengimbangi pembangunan postur militer negara-negara lain di kawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif untuk menjelaskan berbagai argumen dan data dalam penelitian, di sisi lain penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Kesimpulannya, dalam penelitian ini terlihat bahwa Indonesia mulai meningkatkan aspek pertahanan dan keamanannya dengan berbagai upaya. Pertama, melakukan kerja sama kontrak senjata dengan Rusia. Kedua, pengembangan industri militer domestik seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Ketiga, meningkatkan PDB yang berbanding lurus dengan peningkatan anggaran pertahanan Indonesia.

Kata Kunci: Dilema Keamanan, Postur Militer, Dinamika Keamanan, Perlombaan Senjata

PENDAHULUAN

Francis Fukuyama, di dalam karyanya yang berjudul *The End of History and The Last Man*, menyatakan bahwa dengan berakhirnya kompetisi besar (Perang Dingin) antara dua kekuatan internasional, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet, kehidupan masyarakat dunia akan jauh lebih damai karena peningkatan kerjasama antarnegara-

bangsa akan dibarengi dengan terwujudnya kesejahteraan sosial, termasuk stabilitas ekonomi dan politik. Selain itu, perang antarnegara-bangsa, terutama antarnegara demokratis, akan berakhir mengingat persaingan ideologi yang menjadi penyebab perang telah usai. Inti dari pandangan Fukuyama ialah bahwa dengan menangnya ideologi demokrasi liberal, tidak ada ideologi alternatif lain setelah itu. Hal ini menjadi pertanda bahwa demokrasi liberal mungkin merupakan “*the end point of mankind’s ideological evolution*” sekaligus sebagai “*final form of human government*”, sehingga Fukuyama menyebut kondisi yang demikian itu sebagai “*the end of history*” (Fukuyama, 2006).

Akan tetapi, periode awal 1990-an, yang ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin antara dua kekuatan adidaya itu, justru memberikan tantangan baru bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan berakhirnya perang dingin, maka negara-negara di kawasan ini, yang tergabung di dalam the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), akan dihadapkan kepada apa yang disebut sebagai the new post-Cold War era. Menurut Alan Collins, dalam karyanya berjudul *The Security Dilemmas of Southeast Asia* (Collins, 2000). Collins mengemukakan serangkaian indikator yang menunjukkan betapa kawasan Asia Tenggara, pada awal era 1990-an itu, masuk ke dalam “a period of uncertainty at best and rising tension at worst”, yakni pengadaan senjata oleh negara-negara anggota ASEAN, mencairnya pertentangan di dalam teritorial/wilayah usai Perang Dingin, kemunculan Cina sebagai sebuah hegemoni kawasan, dan hampir meratanya ketegangan etnik di seluruh wilayah (Collins, 2000).

Di tengah ketegangan yang masih terlihat di sejumlah titik di Asia, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dalam siaran persnya, 17 Maret 2014, melansir data soal kenaikan impor senjata dunia pada kurun 2009-2013. SIPRI adalah lembaga pemikir berbasis di Stockholm, Swedia, yang mengawasi perdagangan senjata dunia. Menurut data SIPRI, jumlah impor senjata konvensional utama dunia mengalami kenaikan sebesar 14 persen pada 2009-2013 dibandingkan kurun waktu sebelumnya, 2004-2008. Dari 10 besar negara importir senjata dunia, 5 berasal dari benua Asia, yaitu India, Tiongkok, Pakistan, Korea Selatan, dan Singapura.

Di Asia, India memimpin dalam impor senjata, di mana dalam kurun lima tahun mencapai 14 persen dari total impor senjata dunia. Jumlah ini mengalami kenaikan dua kali lipat dari presentase impornya pada 2004-2008 yang hanya sebesar 7 persen. Dengan presentase ini, impornya sekitar tiga kali lipat dari negara tetangganya, Tiongkok dan Pakistan. Pemasok utama senjata ke India pada 2009-2013 adalah Rusia, sekitar 75 persen, lalu diikuti Amerika Serikat (7 persen) dan Israel (6 persen). Sedangkan impor senjata Pakistan sebesar 5 persen, yang sebagian besar berasal dari Tiongkok (54 persen) dan Amerika Serikat (27 persen). Negara-negara Asia lain yang menunjukkan presentase impor besar adalah Korea Selatan dan Singapura. Korea Selatan, meskipun presentasenya besar, namun sebenarnya impor senjata mereka relative menurun dalam dua kurun waktu (2004- 2008 dan 2009-2013), sedangkan Singapura mengalami sedikit peningkatan yang awalnya 2 persen menjadi hampir 3 persen.

Untuk Korea Selatan, meskipun mengalami penurunan impor senjata namun anggaran pertahanannya mulai 2014, dan untuk lima tahun ke depan, meningkat menjadi 214 triliun Won. Jepang, yang setelah Perang Dunia II kekuatan militernya dibatasi hanya untuk peran bela diri, juga berupaya meningkatkan kemampuannya dengan menaikkan anggaran militernya sebesar 5 persen untuk lima tahun ke depan (2014-2019) senilai 24,7 triliun Yen atau sekitar 240 juta dollar AS, termasuk di dalamnya akan melakukan pembelian jet tempur siluman (Stealth), kapal selam dan kapal canggih lainnya.

Tiongkok, yang menaikkan anggaran militernya sebesar 12,2 persen pada 2014, tidak diragukan lagi akan terus memodernisasi dan meningkatkan kinerja angkatan bersenjata. Ketegangan di Laut China Selatan (LCS) yang belum surut, akibat tumpang tindih klaim teritorial, telah memaksa Vietnam dan Filipina yang terlibat sengketa dengan Tiongkok juga meningkatkan kapabilitas militernya. Vietnam membeli berbagai senjata dari Republik Ceko, Kanada, dan Israel serta kapal selam dari Rusia.

Vietnam bahkan dikabarkan tengah memesan peluru kendali dari India. Sementara Filipina menargetkan pembelian dua kapal penyergap baru, dua helikopter anti-kapal selam, tiga kapal cepat patroli pantai, ditambah delapan kendaraan serbu bagian dari negara-negara di kawasan, juga terus meningkatkan kapabilitas militernya, di antaranya dengan menargetkan di tahun 2014 ini kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/ MEF) pada rencana strategis dapat mencapai 40-42 persen, yang di dalamnya juga mencakup penambahan alutsista TNI. Data terbaru SIPRI dan perkembangan kapabilitas militer negara-negara di kawasan ini seolah-olah memberi sinyal adanya peningkatan kekuatan militer, atau bahkan ada yang menyebutnya telah terjadi “perlombaan senjata” di antara negaranegara kawasan. Kajian singkat ini mencoba memahami apa yang menggerakkan terjadinya peningkatan kekuatan militer tersebut (Studies, 1997).

Namun demikian, lanjut Collins, kedua negara tersebut mendapatkan pukulan keras tatkala badai krisis ekonomi menerpa Asia Tenggara. Menyikapi hal tersebut, Indonesia menunda pengadaan persenjataannya hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Lain halnya dengan Thailand, yang justru memilih untuk memesan Jet Hornet F/A-18 dari AS (Collins, 2000). Selanjutnya, pada catatan kaki di dalam penjelasannya terkait krisis ekonomi yang memukul kedua negara di Asia Tenggara tersebut, dengan mengacu pada pemberitaan The Sydney Morning Herald 12 Maret 1998, Collins juga memberikan penjelasan tambahan bahwa Thailand mengurangi pesanan delapan F/A-18 pada Maret 1998 dan Indonesia mengambil langkah untuk menunda pemesanan dua belas SU-30 dan delapan helikopter Mi-17 dari Rusia pada Januari 1998.

Krisis ekonomi yang mengguncang Asia Tenggara juga dirasakan oleh sejumlah negara lain di kawasan ini. Malaysia menanggukkan modernisasi persenjataan negaranya hingga tahun 2000, tetapi telah menyatakan niatnya untuk membeli dua frigate (kapal pengawal), juga kapal selam dan helikopter- serang. Berbarengan dengan Malaysia, Singapura, yang tidak memiliki rencana untuk membatasi pemesanan sebanyak tiga puluh pesawat, bahkan mengambil kiriman lanjutan F-16 Fighters dari AS. Anggaran pertahanan Singapura pada Februari 1998 memang mengalami kenaikan dari 4,4% menjadi 4,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB)-nya. Filipina, kendatipun sangat tergantung kepada kemajuan perekonomian, juga telah mengumumkan alokasi sebesar \$13 milyar untuk program modernisasi persenjataannya, termasuk untuk pembelian sebanyak dua puluh empat pesawat tempur multi role-fighter aircraft serta tujuh kapal patroli.

Asia Tenggara sedang membangun system persenjataan dengan cepat. Menurut data yang diterbitkan oleh Stockholm International Institute Peace and Research Institute (SIPRI), pengeluaran militer di kawasan Asia Tenggara ini meningkat rata-rata lebih dari lima persen sejak tahun 2015. Jika kita melihat dinamika persenjataan di kawasan itu lebih sepuluh tahun, menjadi lebih jelas mengapa kemungkinan dari arms race ("perlombaan senjata") di bagian benua Asia ini semakin menarik perhatian para politisi, akademisi, dan media selama dekade terakhir (2006–2015), pengeluaran militer negara-negara di Asia Tenggara telah meningkat rata-rata sebesar 57 persen.

Secara absolut (dalam dolar AS per 2014), Vietnam, Indonesia, dan Kamboja lebih dari dua kali lipat pengeluaran mereka untuk militer antara tahun 2005 dan 2015. Di negara-negara seperti Thailand dan Filipina, belanja militer juga meningkat tajam. Impor senjata oleh masing-masing negara Asia Tenggara menunjukkan sebuah gambaran serupa. Untuk periode 2011–2016, Vietnam bahkan berada di sepuluh besar importir senjata terbesar di dunia (di urutan kedelapan, dengan total volume US\$ 4,1 miliar). Dibandingkan dengan periode 2006–2011, Impor senjata Vietnam meningkat hampir tujuh kali lipat. Impor senjata Thailand meningkat lebih dari lima kali lipat antara periode lima tahun 2006–2011 dan 2011–2016, sedangkan Indonesia berlipat ganda, seperti terlihat pada table di bawah ini:

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa ketenangan dan keutamaan yang diberikan pada masalah militer dan perubahan terkait dalam dinamika persenjataan menunjukkan bahwa fase stabilitas dan keamanan relatif di kawasan, yang telah berlangsung sejak akhir Perang Tiongkok-Vietnam pada tahun 1979 dan telah disebut sebagai 'perdamaian panjang ASEAN, mungkin akan segera berakhir. Indikator selanjutnya adalah persistensi konflik teritorial antara banyak negara di kawasan itu; meningkatnya nasionalisme; ketidakpercayaan terhadap niat strategis negara-negara tetangga; dan meningkatnya persaingan antara Cina dan AS.

Salah satu reaksi paling umum dari hampir semua negara Asia Tenggara terhadap perkembangan ini adalah membangun kapasitas militer mereka. Namun, justru sikap dan tindakan inilah yang sering dianggap oleh negara-negara lain sebagai potensi ancaman keamanan, terlepas dari 'niat sebenarnya'. Dilema keamanan yang tercipta dapat mengarah pada perlombaan senjata yang secara besar-besaran akan mengacaukan kawasan karena meningkatnya ketegangan antara negara-negara yang semakin dipersenjatai dapat memiliki konsekuensi yang sulit untuk dihitung, misalnya di Laut Cina Selatan dengan banyak konfliknya. Hal ini juga akan berdampak langsung ke Eropa karena sebagian besar perdagangannya dengan Asia – yang sangat penting bagi perekonomian dunia – menggunakan jalur pelayaran di perairan tersebut.

Dari serangkaian data di atas, yang memperlihatkan peningkatan anggaran belanja untuk persenjataan di kawasan Asia Tenggara pasca- berakhirnya Perang Dingin, dapat dimaknai bahwa sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara masih dan terus berupaya memperkuat postur pertahanan (kekuatan dan kemampuan) militernya. Kondisi ini dapat dipahami mengingat di kawasan Asia Tenggara juga tersimpan sejumlah sengketa tapal batas wilayah/teritorial antar-negara.

Saat ini terdapat berbagai potensi konflik dan sengketa perbatasan teritorial antarnegara di hampir sebagian besar kawasan Asia Tenggara. Hal ini berpotensi memunculkan konflik dengan eskalasi lebih besar, misalnya perang, yang akan mengarah kepada penggunaan atau pengerahan kekuatan militer yang dimiliki oleh masing-masing negara yang berseteru. Hal ini bisa saja terjadi di Asia Tenggara, sungguhpun pada masa pasca-Perang Dingin memang belum pernah terjadi perang militer berskala besar di kawasan ini.

Dari kesepuluh negara di Asia Tenggara, beberapa negara berada pada posisi teratas dari segi kekuatan dan kemampuan (postur) militer. Negara-negara tersebut antara lain Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Di tengah pembangunan kekuatan dan kemampuan militer sejumlah negara di Asia Tenggara ini dan dalam kaitan dengan dinamika/ancaman lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara, terlebih krisis ekonomi yang juga pernah terjadi pada 1998, apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia

serta bagaimana keberhasilan postur pertahanan yang dibangun oleh Indonesia untuk mampu mengimbangi perkembangan/pembangunan kekuatan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara selama periode 2014-2021 menarik untuk diteliti.

Atas dasar paparan di atas, penelitian ini hendak memfokuskan telaah pada unit analisa negara-bangsa yaitu Indonesia, dalam upaya memperkuat postur militer/pertahanan guna menjaga kedaulatan wilayah/teritorialnya. Peneliti menyoroti persoalan bagaimana Indonesia merespon dinamika kawasan atau ancaman lingkungan strategis, terutama dalam merespon pembangunan kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara pada rentang waktu 2014-2021. Pemilihan interval waktu ini didasarkan pada pemikiran bahwa adalah penting untuk mengetahui respon Indonesia dalam periode satu dekade terakhir di tengah perubahan regional Asia Tenggara yang sifatnya strategis dan dinamis. Pemahaman mutakhir yang diperoleh memungkinkan penulis untuk dapat menganalisis secara akademik dan kemudian memahami kebijakan di sektor penguatan postur pertahanan Indonesia.

Rentang waktu selama 2014-2021, didasarkan pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi dan disesuaikan dengan dikeluarkannya Buku Putih Pertahanan Indonesia pada tahun 2014, serta masa di mana pelanggaran kedaulatan menjadi isu yang sangat mengemuka. Ruang lingkup kajian 2014-2021 ini juga didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, mengacu pada pengamatan Collins, meskipun perang dingin berakhir, yang terjadi justru peningkatan belanja persenjataan militer oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Kedua, semakin tingginya eskalasi konflik yang dipicu oleh claim dari beberapa negara Asia Tenggara dan China terkait sengketa kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan. di Ketiga, lepasnya dua pulau yang sebelumnya terintegrasi dengan Indonesia, Sipadan dan Ligitan.

Menang dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional, dua pulau ini pada akhirnya menjadi bagian dari kedaulatan Malaysia. Tidak sampai di situ, persoalan yang menyangkut sengketa tapal batas dengan negara-negara yang secara teritorial bersebelahan langsung dengan Indonesia bahkan kian mengemuka. Berdasarkan latar belakang dan focus masalah tersebut di atas, maka Tesis ini akan mengkaji dampak dari perlombaan senjata di Kawasan Asia Tenggara terhadap kebijakan pertahanan Indonesia, dengan judul : “Respon Dan Kebijakan Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Arms Race Di Kawasan Asia Tenggara (2014-2024)”

KERANGKA ANALITIK

Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami Perilaku internasional suatu negara didasari oleh kepentingan nasional, yang berfungsi sebagai tujuan fundamental dan faktor utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Hans Morgenthau, seorang realis, mengaitkan kepentingan nasional dengan usaha negara untuk mengejar kekuasaan (power) yang dapat dicapai melalui paksaan atau kerja sama.

Secara normatif, kepentingan nasional melibatkan cita-cita negara, termasuk upaya mengejar kekuasaan dan tujuan lain. Secara deskriptif, kepentingan ini merupakan tujuan tetap yang harus dicapai negara, yang sering kali dituangkan dalam konstitusi. Menurut Paul Seaburg, kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita dan tujuan suatu bangsa yang diwujudkan melalui hubungan dengan negara lain.

Kepentingan nasional timbul dari keterbatasan sumber daya negara dan melibatkan keamanan, kesejahteraan, serta kelangsungan hidup rakyat dan wilayahnya. Selain itu, William D. Coplin menyoroti perdebatan mengenai kepentingan subnasional dan kolektif dalam perumusan kebijakan luar negeri. Jack D. Plano dan Roy Olton mengartikan kepentingan nasional sebagai kepentingan vital suatu bangsa, meliputi kemerdekaan, kelangsungan hidup, integritas wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Kepentingan nasional juga berfungsi sebagai landasan dalam menjaga ketertiban internasional, di mana setiap negara merumuskan strategi dan sasaran politiknya untuk melindungi identitas fisik, politik, dan kultural dari ancaman luar. Dalam konteks ini, Suffri Yusuf menekankan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kepentingan nasional menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyesuaikan tindakan politik mereka dengan realitas global. Kepentingan ini mencerminkan kebutuhan negara untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dan internasional, sehingga hubungan antarnegara dapat terjaga melalui interaksi yang didasarkan pada keamanan dan kesejahteraan bersama.

Dalam perspektif hubungan internasional, tindakan suatu negara terhadap negara lain tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang sebenarnya bermuara pada kepentingan nasional. Nuchterlin menyatakan bahwa kepentingan nasional suatu negara dipengaruhi oleh faktor ideologi, pertahanan, ekonomi, dan tata regional/internasional. Kepentingan nasional sangat melekat pada tujuan politik luar negeri atau tindakan dari suatu negara. Menurut Morgenthau, Kepentingan nasional sendiri terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Core/ Basic/ vital interests, yakni kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam pencapaiannya. Contohnya: melindungi daerah teritorialnya dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut oleh negara tersebut.
2. Secondary interests, yakni segala macam keinginan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan.

Sementara itu, Donald E. Nuechterlin mengidentifikasi kepentingan nasional kedalam empat jenis, yaitu:

1. Kepentingan pertahanan yang menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan ekonomi yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
3. Kepentingan tata internasional yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya.
4. Kepentingan ideologi yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Abdul A. Said pun menganggap bahwa kepentingan nasional dapat digolongkan dalam jenis tujuannya. Pada umumnya kepentingan nasional dilakukan demi (1) Pertahanan (self-preservation); (2) Keamanan; (3) Kesejahteraan; (4) Prestige; dan (5) Ideologi.

Dengan demikian kepentingan nasional bersumber dari pemakaian sintesis nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan situasi, dimana negara mengambil tempat pada politik dunia. Konsep kepentingan nasional itu sendiri memberikan ukuran konsistensi

yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan nasional, suatu negara memerlukan kapabilitas untuk menopang kebijakan luar negerinya yang terealisasi melalui power.

National Security dan Arms Race

Pertahanan negara merupakan bagian dari keamanan nasional, yang dimaknai sebagai kemampuan Indonesia untuk melindungi diri dari ancaman militer eksternal. Dalam sistem internasional yang anarkis, seperti dijelaskan oleh John Herz, negara-negara saling mencurigai satu sama lain, sehingga memprioritaskan keamanan dengan meningkatkan belanja militer. Kondisi ini memicu perlombaan senjata, yang menurut Buzan adalah akibat dari perkembangan teknologi militer. Perlombaan senjata melibatkan reaksi negara terhadap ancaman eksternal melalui penguatan militer, seperti yang dijelaskan oleh model aksi-reaksi. Selain itu, ada model struktur domestik yang menekankan pengaruh kekuatan internal negara dan model imperatif teknologi yang menyoroti pentingnya kemajuan teknologi. Penulis juga menggunakan konsep balance of power dan strategic stability untuk menjelaskan upaya Indonesia dalam menjaga keseimbangan militer dengan negara-negara Asia Tenggara, khususnya terkait senjata konvensional.

Perlombaan senjata sering kali terjadi akibat adanya rasa saling curiga antarnegara dalam sistem internasional yang anarkis. Ketika satu negara meningkatkan kekuatan militernya, negara lain merasa terancam dan merespons dengan cara yang sama. Hal ini menciptakan security dilemma, di mana setiap negara berusaha untuk memperkuat pertahanannya tanpa menimbulkan ketidakstabilan. Dalam konteks ini, model aksi-reaksi yang dijelaskan oleh Buzan menekankan bahwa dinamika persenjataan dipicu oleh persepsi ancaman eksternal, sehingga negara-negara merasa perlu meningkatkan persenjataannya untuk melindungi diri.

Selain faktor eksternal, dinamika persenjataan juga dipengaruhi oleh faktor internal negara, seperti struktur politik, ekonomi, dan organisasi militer. Model struktur domestik menyoroti pentingnya riset dan pengembangan (R&D) militer sebagai penopang utama kekuatan militer sebuah negara. Tanpa institusi R&D yang kuat, sulit bagi negara untuk menjadi mandiri dalam memproduksi persenjataan. Dalam hal ini, pelembagaan riset militer menjadi kunci dalam mendorong inovasi teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan militer suatu negara.

Dalam mengelola keamanan dan persenjataan, Indonesia juga berusaha menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan Asia Tenggara. Konsep ini penting untuk memastikan tidak ada negara yang mendapatkan keunggulan militer signifikan yang dapat mengganggu stabilitas regional. Untuk menjelaskan perimbangan kekuatan ini, penulis menggunakan konsep strategic stability, yang menggambarkan keseimbangan kekuatan militer konvensional antarnegara. Indonesia berupaya memastikan bahwa peningkatan kekuatan pertahanan tidak menciptakan ketegangan berlebih, tetapi justru mendorong stabilitas regional yang berkelanjutan.

Deterrence

Mengutip William Tow, di dalam studi hubungan internasional realisme “attempts to deal with human nature as it is and not as it ought to be, and with historical events as they occurred, not as they should have occurred.” Artinya, realisme berupaya untuk menjelaskan sifat dasar manusia itu dengan ‘sebagaimana adanya,’ bukan ‘sebagaimana

yang seyogyanya atau sebagaimana yang seharusnya.’ Dalam konteks pemikiran realis, Tow menjelaskan bahwa tiap negara-bangsa, di dalam struktur internasional yang anarkis, senantiasa mengejar kepentingan nasional melalui penguatan power (kekuatan) yang dimilikinya. Praktis, upaya untuk meraih kepentingan politik ini berada di atas dimensi sosial dan ekonomi.

Lebih jauh lagi, masih menurut Tow, dengan mengacu kepada pemahaman tersebut, setidaknya ada empat hal yang bisa ditarik sebagai poin kunci. Pertama, bahwa setiap negara, sebagai unit utama di dalam sistem internasional, berusaha merumuskan postur kekuatan strategis yang ia miliki, sembari tetap membangun serta mengejar kepentingannya sendiri di tengah lingkungan internasional yang anarkis guna mencapai apa yang disebut sebagai order (ketertiban). Kedua, masing-masing negara tidak dapat memastikan apa sebenarnya kehendak strategis antar mereka. Ketiga, kemampuan strategis yang dimiliki bersifat ofensif dan hal itu berarti menciptakan rasa saling tidak aman (berbahaya) satu sama lain, dan, keempat, bahwa negara-negara menghendaki survival (eksis) dengan kedaulatannya masing-masing karena sifat dasar yang melekat dari masing-masing negara itu adalah rasional dan defensif.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni data yang dikumpulkan sebagian besar data deskriptif dalam bentuk laporan uraian. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif didasarkan pada beberapa hal yang di antaranya; pertama, permasalahan belum jelas, kedua permasalahan bersifat holistik. Ketiga, Permasalahan bersifat kompleks. Keempat, permasalahan bersifat dinamis dan penuh makna.

Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori. Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan alasan bahwa peneliti adalah manusia yang merupakan makhluk sosial yang bersifat subyektif sebagai bagian dari obyek yang diteliti, sehingga akan dapat menciptakan empati ketika melakukan penelitian di lapangan.

Deskriptif analisis, yaitu: suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pertahanan Indonesia dalam menghadapi Arms Race di Asia Tenggara

Sebagaimana diketahui, secara geostrategi, Indonesia merupakan negara yang terletak di posisi silang yang strategis antara Samudera Hindia dan Pasifik, diantara Benua Asia dan Australia, dan merupakan jalur pelayaran dunia (sea lines of communication/SLOC). Oleh sebab itu, Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang bisa dilalui oleh kapal asing dari berbagai negara dan tujuan. Posisi strategis yang dimiliki Indonesia di sisi lain dapat menimbulkan kerawanan

terhadap pertahanan keamanan Indonesia yang memiliki celah terbuka di berbagai wilayah.

Meningkatnya pengaruh Tiongkok (People’s Republic of China) secara militer juga berpotensi menjadi ancaman pertahanan di kawasan. Sengketa Tiongkok mengenai kepulauan Spratly dan Paracel, sejak beberapa waktu lalu dengan beberapa negara ASEAN, dan klaim Tiongkok atas sebagian wilayah Natuna dapat mengancam integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia. Potensi konflik militer di wilayah perbatasan ini cukup besar mengingat banyak sengketa batas wilayah Indonesia dengan negara lain yang juga belum terselesaikan, seperti: perairan ambalat dan perbatasan darat dengan malaysia, perbatasan darat dengan Timor Leste, dll. Pemerintah Indonesia mencatat sampai saat ini, masih ada 10 masalah perbatasan negara yang belum selesai.

Potensi hot spot di kawasan Asia Tenggara karena perlombaan senjata juga menjadi pertimbangan pemerintah. Kemampuan alutsista negara-negara tetangga dinilai telah melampaui kekuatan alutsista milik sendiri. Dari aspek jelajah tempur dan kemampuan, pesawat tempur negara tetangga mampu terbang ke seluruh wilayah Indonesia. Begitu pun dengan armada laut negara tetangga yang memiliki kemampuan samudera (blue water navy) dan tidak hanya mampu beroperasi di perairan teritorialnya (green water navy). Indonesia memandang bahwa perlombaan senjata telah terjadi di kawasan Asia. Hal ini ditandai dengan belanja militer yang besar dan berdampak pada menguatnya kemampuan militer di kawasan serta terjadinya pergeseran kekuatan regional.

Membbaiknya ekonomi negara-negara di kawasan telah membuat negara-negara tersebut melakukan revitalisasi dan modernisasi pertahanan. Bagi Indonesia, hal ini dapat menjadi potensi instabilitas kawasan dan mengancam kepulauan Natuna yang kaya minyak dan gas atau mengancam daerah-daerah lain di Indonesia. Berbagai perkembangan lingkungan strategis tersebut, membawa konsekuensi menjadi ancaman pertahanan negara. Hal ini membuat Indonesia perlu merumuskan kembali kebijakan pertahanannya terutama postur pertahanan yang ingin dibangun. Sebagaimana diketahui, postur pertahanan Indonesia dalam hal kesiapan alutsista sangat jauh dari kesiapan maksimal. Bila diambil rata-rata, tingkat kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) berada di kisaran angka 68,85%, tingkat kesiapan TNI Angkatan Laut(AL) sebesar 46,27%, dan tingkat kesiapan TNI Angkatan Udara (AU) sebesar 78,93%.

Belum maksimalnya tingkat kesiapan alutsista tersebut disebabkan oleh rendahnya anggaran pertahanan sebagai dampak dari keterbatasan keuangan negara. Sampai saat ini, anggaran pertahanan Indonesia hanya berkisar 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengalami trend menurun dari tahun ke tahun dari segi prosentase. Namun dari sisi jumlah, anggaran tersebut menunjukkan kenaikan. Hal ini berarti bahwa kenaikan anggaran pertahanan belum sesuai dengan kenaikan PDB.

Bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia merupakan negara yang relatif lebih kecil dalam anggaran pertahanan, terutama bila dilihat dalam konteks luas wilayah sebesar 1.905.000 km² yang harus dilindungi. Negara Singapura yang memiliki luas kira-kira 1000 km² (pada tahun 2011) memiliki anggaran pertahanan sebesar 9,4 Milyar USD. Jumlah ini memiliki makna 18,7% dari total pengeluaran pemerintah Tahun 2011 (APBN), dan sebesar 3,7% PDB. Negara Thailand, memiliki anggaran pertahanan yang lebih besar dibanding Indonesia. Dengan luas wilayah sebesar 513.000 km², anggaran pertahanan Thailand pada 2011 sebesar 5,6 Milyar USD. Jumlah tersebut memiliki arti 6,8% total anggaran Pemerintah Thailand Tahun 2011 dan berarti

1,6% dari PDB. Meskipun ekonomi Thailand terpengaruh oleh Krisis Ekonomi Global, namun anggaran pertahanannya konsisten di atas 1% PDB. Malaysia pun tidak jauh berbeda. Meski memiliki anggaran pertahanan yang lebih kecil dari Indonesia, namun dengan luas wilayah sebesar 330.000 km², Malaysia menikmati anggaran pertahanan sebesar 1,7% dari PDB, atau setara dengan 5,6% dari total anggaran pemerintah Malaysia selama satu tahun sebesar 4,8 Milyar USD. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan anggaran pertahanan Malaysia sebesar 19,3%.

Berdasarkan berbagai ancaman lingkungan strategis baik aktual maupun potensial di tengah keterbatasan anggaran pertahanan, Pemerintah Indonesia merumuskan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2010 untuk mengatasi ancaman tersebut. Dalam kebijakan pertahanan, pembangunan postur pertahanan militer Indonesia difokuskan dan diprioritaskan kepada postur pertahanan yang dinamakan dengan Minimum Essential Force (MEF) atau diartikan sebagai kekuatan pokok minimum. Dalam istilah yang mudah dipahami, postur pertahanan menurut Edy Prasetyono adalah gambaran tentang kekuatan pertahanan yang mencakup kemampuan, kekuatan, gelar kekuatan, serta sumber-sumber daya nasional. Hampir semua negara merancang postur pertahanannya untuk menangkal atau mempunyai daya tangkal dan mampu menjalankan peperangan. Pengembangan postur pertahanan inilah yang kemudian diimplementasikan menjadi MEF.

Pemenuhan Minimum Essential Force Militer Indonesia

Pengertian MEF secara jelas bisa didapatkan dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) 2010-2014. MEF atau kekuatan pokok minimum diartikan sebagai standar kekuatan pokok dan minimum TNI, yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama dan mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI, dalam menghadapi ancaman aktual. Pembangunan MEF merupakan kekuatan yang paling mungkin dibangun oleh negara secara bertahap dan berkelanjutan. Bagi Kementerian Pertahanan RI, MEF merupakan komponen utama yang mendesak dan dibutuhkan untuk pembangunan sistem (system building) dan pembangunan kekuatan (force building) pertahanan negara dalam kerangka pembangunan postur pertahanan menuju ideal secara bertahap dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024.

Istilah kekuatan pokok minimum pertama kali muncul dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Namun dalam undang-undang tersebut belum dijelaskan secara spesifik pengertian dan bagaimana kekuatan pokok minimum akan diwujudkan. Dalam perencanaan selama 20 tahun, kekuatan TNI hanya diarahkan untuk melampaui kekuatan pokok minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional. Dengan demikian, konsep pembangunan kekuatan pokok minimum sesungguhnya merupakan konsep yang relatif baru secara legal formal karena tidak ditemukan di Undang-Undang Pertahanan Negara No. 3 tahun 2002.

Secara eksplisit, MEF diperkenalkan melalui Kebijakan Umum Pertahanan Negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2008. Menurut Perpres tersebut, Pembangunan komponen utama didasarkan pada konsep pertahanan berbasis kapabilitas (capability-based defence). Menurut Buku Putih Pertahanan, terdapat enam faktor utama

mengapa pertahanan negara dirancang berdasarkan kapabilitas. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Perkiraan ancaman terhadap Indonesia dan segala kepentingannya, yakni ancaman yang menjadi domain fungsi pertahanan, termasuk tugas-tugas pelibatan pertahanan yang sah.
2. Strategi Pertahanan Negara yang menyinergikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan menyeluruh.
3. Tingkat penangkalan yang memenuhi standar penangkalan agar dapat menangkalkan ancaman yang diperkirakan.
4. Tingkat probabilitas kerawanan tertinggi bagi Indonesia yang menjadi sumber-sumber ancaman atau sumber-sumber konflik di masa datang.
5. Luas wilayah dan karakteristik geografi Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dengan wilayah perairan yang luas dan terbuka.
6. Kemampuan rasional negara dalam membiayai pertahanan negara, termasuk dalam pembangunan kapabilitas pertahanan negara dengan tidak mengorbankan sektor-sektor lain.

Pelaksanaan pertahanan berbasis kemampuan inilah yang kemudian diarahkan menuju kekuatan pokok minimum yang dikenal dengan MEF. Dalam Perpres No. 7 Tahun 2008, MEF diartikan sebagai tingkat kekuatan yang mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan yang mendesak. Pengadaan alutsista dan peralatan lain, diprioritaskan untuk menambah kekuatan pokok minimal dan atau mengganti alutsista/alat peralatan yang tidak layak pakai. Terkait dengan kekuatan TNI, pembangunan TNI AD diarahkan kepada tercapainya pemantapan kekuatan berupa kesesuaian dan pemenuhan personil alutsista. Hal ini berbeda dengan pembangunan kekuatan TNI AL dan AU yang diarahkan kepada modernisasi dan pengembangan berupa kesetaraan strategis dengan negara-negara di kawasan dan mengikuti perkembangan teknologi alutsista. Dengan masuknya teknologi alutsista sebagai pertimbangan kuat untuk membangun kekuatan pertahanan, jelas terlihat arah pemerintah untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan perimbangan kawasan yang memiliki keunggulan teknologi.

Dalam Buku Putih Pertahanan yang diterbitkan Tahun 2008, disebutkan bahwa TNI sebagai kekuatan bersenjata dibangun dan dikembangkan secara profesional untuk mencapai standar penangkalan. Standar penangkalan yang dikembangkan adalah standar kekuatan melampaui kekuatan pokok minimum yang mampu menjaga NKRI dan disegani minimal di tingkat regional. Selama ini, pembangunan kekuatan TNI dikesampingkan karena prioritas pembangunan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. Namun hal ini membuat kekuatan TNI menjadi tertinggal dibanding kekuatan negara yang dahulu dibawah Indonesia.

Analisa dan Pembahasan

Seiring dengan pertumbuhan dan daya tahan perekonomian beberapa tahun terakhir, pembangunan kekuatan pertahanan mulai terlihat di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di kawasan Asia Tenggara, sehingga cukup banyak yang mempercayai bahwa saat ini terjadi perlombaan senjata di Asia Tenggara. Peningkatan persentase impor senjata yang melonjak tajam, menjadi faktor penilaian perlombaan senjata ini oleh media luar. *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) bahkan mengklaim

memiliki bukti kuat mengenai perlombaan senjata ini. Terlepas dari penilaian isu perlombaan senjata, pertumbuhan ekonomi yang selalu positif dan menjanjikan, merupakan momentum bagi Indonesia yang dimanfaatkan sebaik mungkin. Selama dua puluh tahun, pembangunan kekuatan pertahanan tersisihkan karena menghadapi krisis ekonomi sehingga pembangunan diprioritaskan kepada kesejahteraan rakyat.

Menurut Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kesempatan pidato di Shangri-la Dialogue, menegaskan bahwa modernisasi angkatan bersenjata Indonesia adalah ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam melindungi perbatasan dan untuk melawan ancaman transnasional. Selain itu, Presiden RI juga menyatakan bahwa pembangunan pertahanan Indonesia dilakukan untuk meningkatkan kontribusi dalam menjaga dan melakukan operasi perdamaian di seluruh dunia, meningkatkan kesiapan untuk operasi militer selain perang, dan untuk melakukan operasi khusus. Indonesia memandang sebagai hal yang umum apabila negara-negara Asia melakukan peningkatan belanja militer dan modernisasi angkatan bersenjata, karena hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fakta pertumbuhan ekonomi Asia yang terus tumbuh. Pertumbuhan menyebabkan trend pertumbuhan belanja militer dan modernisasi angkatan bersenjata yang terjadi di seluruh Asia.

Saat ini, seperti juga negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia secara intensif melakukan pembangunan kekuatan pertahanan yang disebut dengan postur pertahanan Minimum Essential Force (MEF) sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Meskipun belum dianggap kondisi ideal dalam membangun kekuatan pertahanan, proses mewujudkan MEF selama lima belas tahun telah menjadi komitmen pembangunan pertahanan Indonesia untuk melakukan modernisasi angkatan bersenjata sekaligus menetapkan dasar pijakan bagi Indonesia menuju kekuatan pertahanan yang ideal. Pembangunan pertahanan suatu negara akan memunculkan pertanyaan mengapa dan bagaimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Oleh sebab itu, bab ini akan mencoba menganalisa dan membahas fenomena Revolution in Military Affairs (RMA) yang diyakini menjadi salah satu inspirasi terhadap pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF). Fenomena RMA sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, telah menjadi sebab terjadinya transformasi pertahanan pada banyak negara termasuk di Australia, Singapura, dan Malaysia yang menjadi negara tetangga di kawasan.

Dalam beberapa kesempatan pidato, Menteri Pertahanan seringkali menyatakan kaitan RMA dengan upaya peningkatan kekuatan/postur pertahanan yang perlu dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu pernyataan tersebut dapat dilihat pada saat Menteri Pertahanan menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar Air Power 2012 yang menyatakan bahwa RMA atau diistilahkan Menteri Pertahanan sebagai revolusi dalam bidang kemiliteran, merupakan salah satu dari tiga faktor yang dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kemampuan TNI AU selain faktor alutsista, teknologi informasi, dan komunikasi.

Menteri Pertahanan kemudian menyebutkan peningkatan kemampuan TNI AU terhadap tiga faktor tersebut salah satunya dilakukan dengan pembangunan pesawat tempur KF-X/IF-X yang bekerjasama dengan Korea Aerospace Industry, Korea Selatan. Selain itu, pengadaan pesawat hibah F-16 dari Amerika Serikat (AS) yang terlebih dahulu mengalami upgrade kemampuan, pengadaan radar-radar pertahanan udara yang semakin mengurangi blank spot menjadi beberapa rencana strategis yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam kesempatan yang lain, Menteri Pertahanan juga mengemukakan

bahwa selain modernisasi alutsista, peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM dan organisasi yang efektif juga perlu terus ditingkatkan agar TNI AU tidak tertinggal dalam Revolution in Military Affairs (RMA). Hal ini sesuai dengan karakteristik matra udara yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

KESIMPULAN

Analisis kebijakan pertahanan Indonesia 2014-2020 menunjukkan negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memperkuat postur militer mereka. Singapura sangat agresif dalam memperkuat semua matra militernya, sementara Indonesia fokus pada pembenahan kelembagaan setelah krisis 1998. Langkah konkret Indonesia baru terlihat pada 2019-2021, ketika kebijakan pertahanan dan pengadaan alutsista mulai digalakkan, meskipun industri pertahanan domestik masih tertinggal.

Meski Indonesia memiliki industri strategis seperti PT Pindad dan PT PAL, kontribusinya terhadap ketiga matra militer masih terbatas. Kurangnya dana, riset, dan pengembangan, serta sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama dalam kemandirian industri pertahanan. Diperlukan peningkatan lulusan berkualitas dalam bidang teknik militer untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.

Dalam konteks regional, meskipun kompetisi persenjataan di Asia Tenggara belum mencapai tahap perlombaan senjata besar, Indonesia masih tertinggal dalam hal kuantitas militer. Untuk meningkatkan postur pertahanan dan mengurangi risiko keamanan, Indonesia perlu meningkatkan PDB dan alokasi anggaran pertahanan. Peningkatan kekuatan militer Indonesia juga berisiko memicu respons dari negara lain, yang dapat memperburuk dilema keamanan di kawasan.

Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mencapai "strategic stability" di kawasan Asia Tenggara. Keterbatasan anggaran dan kemampuan dalam menganalisis dinamika lingkungan strategis menjadi penghambat utama dalam pengembangan postur pertahanan yang kuat. Dalam jangka panjang, peningkatan anggaran pertahanan melalui pertumbuhan ekonomi menjadi solusi penting agar Indonesia dapat mencapai kekuatan militer yang lebih memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Namun, upaya ini harus sejalan dengan reformasi dalam pelembagaan riset dan pengembangan, serta peningkatan SDM, agar kemandirian industri pertahanan dapat terwujud secara optimal.

Di sisi lain, Indonesia perlu berhati-hati dalam memperkuat postur militernya, karena langkah ini dapat memicu ketegangan regional. Jika Indonesia secara agresif meningkatkan kekuatan militernya, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia mungkin akan merespons dengan melakukan hal yang sama, sehingga mendorong kompetisi persenjataan yang lebih intens. Dalam situasi ini, diperlukan langkah-langkah diplomatik seperti Confidence Building Measures (CBMs) untuk menciptakan transparansi dan mencegah eskalasi ketegangan. Dengan demikian, penguatan pertahanan Indonesia harus disertai dengan diplomasi aktif untuk menjaga stabilitas kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Collins, A. (2000). *The security dilemmas of Southeast Asia*. Springer.

<i>DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL</i> Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Vol. 1, No. 1 Tahun 2024 Hal. 392-405 e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v1i1.2893	Article History: Submitted: Sept 10, 2024 Accepted: Oct 24, 2024 Published: Oct 27, 2024
---	---

Fukuyama, F. (2006). *The end of History and the Last man*. Simon and Schuster. Studies,
I. I. F. S. (1997). *The military balance 1997/98*. Oxford University Press, USA.